

PERILAKU BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Fricky Limbat¹
Michael Mantiri²
Sofia Pangemanan³

Abstrak

Mewujudkan pemerintahan pemerintahan yang baik dan bersih tentunya perilaku atau etika dalam pemerintahan tentunya sangat diharapkan yang terbaik bagi aparat birokrasi. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur perilaku dari para aparat pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yang baik didalam birokrasi, dan menjalankan fungsi akuntabilitas, *equity*, *loyalty*, *responsive*, dan *rule of law*. Tujuan penulisan ini untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah itu sendiri yaitu perilaku birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik yang difokuskan kepada aparatur di kantor kecamatan. Penelitian ini berbentuk deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu dan keadaan sosial yang timbul di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Penelitian dilakukan di kantor kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow. Perilaku birokrasi di kecamatan passi timur kabupaten bolaang mongondow ada banyak kelemahan yang terjadi dalam hal kejelasan dalam pemahaman terhadap tahapan-tahapan good governance yang meliputi pelayanan yang kurang baik, tidak efisien waktu sehingga proses penyelesaian lambat, dan kurangnya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab pegawai.

Kata Kunci : Perilaku, Birokrasi, Pemerintahan yang baik.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat..

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Birokrasi sebagai suatu sistem pengorganisasian aparatur negara dengan tugas yang sangat luas dan kompleks sangatlah diperlukan dalam pengendalian operasi manajemen pemerintahan, namun kinerja birokrasi dan rutinitas kegiatan pejabat dan aparat birokrasi sering menyebabkan masalah baru. Pentingnya perilaku yang baik, ditetapkan dalam birokrasi. Pertama, masalah yang ada dalam birokrasi semakin lama semakin kompleks. Kedua, keberhasilan pembangunan yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan birokrasi. Pemerintah memiliki pola perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap aparturnya. Sangat dibutuhkan prinsip dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak pada penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai patologi birokrasi atau gejala penyimpangan birokrasi atau disfungsi birokrasi, hal ini menyimpulkan bahwa patologi birokrasi adalah penyakit Negara yang timbul akibat perilaku para birokrat yang membuka kesempatan itu. Dalam kaitannya dengan fenomena perilaku birokrasi maka kedudukan, peran dan fungsinya tidak dapat dipisahkan dari individu selaku aparat (pegawai) yang mempunyai persepsi, nilai, motivasi dan pengetahuan dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab social.

Perilaku manusia dalam organisasi sangat menentukan pencapaian hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku seorang individu terbentuk melalui proses interaksi antara individu itu sendiri dengan lingkungan kerjanya,

begitu juga dengan sikap, sikap adalah keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi obyek situasi atau kondisi di lingkungan sekitarnya pengalaman pribadi dan kebudayaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi sikap, dan ada beberapa perilaku dan permasalahan yang terjadi didalam birokrasi salah satunya yaitu: Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku dari aspek kejiwaan, dengan adanya perilaku psikologi yang dapat mempengaruhi aspek perilaku manusia, permasalahan yang menyangkut didalam birokrasi adanya ketakutan pada perubahan yang ada di dalam birokrasi, inovasi dan resiko, ketidak pedulian kepada kritik dan saran, takut mengambil keputusan dan minimnya pengetahuan, ini sangat mempengaruhi pemerintah yang menjalankan tugas dan wewenang. Setiap karakteristik perilaku seseorang sangat berbeda dan dapat berubah, dengan perubahan perilaku yang sangat signifikan dan tidak menentu mengakibatkan takutnya pengambilan keputusan tanggung jawab (Responsibility) kurangnya pelayanan yang baik, merugikan lembaga masyarakat (responsif) dan menjadi lalai dalam tanggung jawab (Responsibility) sebagai pemegang kendali didalam birokrasi, disini di kaitkan dengan permasalahan di atas, pemegang kendali harus mempunyai pedoman dan tidak takut dalam pengambilan keputusan dan berani untuk memberikan pelayanan yang maksimal (Responsibility) dan (responsif) untuk setiap pihak yang berkepentingan dan bertanggung jawab baik untuk semua sektor dan organisasi di dalam masyarakat. Dengan adanya

(Equity) keadilan, kedisiplinan dan tanggung jawab seorang birokrat akan lebih efektif dan berani terhadap aturan yang berlaku dan dalam pengambilan keputusan, karena dengan adanya keadilan, aturan dan (loyalitas), semua itu diberlakukan untuk mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik.

Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari sistem sosial dimana individu memainkan perannya. Artinya sosiologi itu mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain (aspek masyarakat). Menyangkut perilaku sosiologi, peran sebagai birokrat di dalam sebuah kecamatan harus masuk dalam ruang lingkup masyarakat agar masyarakat mengenal struktur dan tugas yang ada di dalam kecamatan dan masyarakat bisa berpartisipasi dengan pemerintah yang menjalankan tugas, dengan kata lain pemerintah harus mengenal masyarakat memberikan pelayanan kepada masyarakat (Equality) dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Permasalahannya, seringkali pemerintah tidak menghiraukan masyarakat dan tidak adanya akuntabilitas dan transparansi membuat masyarakat tidak mengetahui struktur dan kegiatan di dalam birokrasi. Masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga lembaga perwakilan, dengan adanya partisipasi masyarakat, pemerintah sebagai pemegang kendali harus transparan dan memberikan pelayanan (Equality) kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti dan memahami peraturan, kegiatan dan struktur di dalam birokrasi.

Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk beluk manusia dan aktivitasnya (aspek budaya). Bicara

tentang sosial, erat kaitannya dengan masyarakat dan hubungan antar masyarakat tersebut. Hubungan antar masyarakat yang beragam akan menciptakan suatu kebiasaan yang disebut juga budaya. Jadi, sosial budaya membahas tentang fakta-fakta kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Dalam proses interaksi tersebut akan muncul beberapa masalah sosial. Masalah sosial dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang mengancam nilai nilai pada masyarakat dan pemerintahan yang berdampak pada birokrasi. Masalah sosial disebabkan oleh beberapa aspek seperti aspek intelegensi, emosional, sosial dan budaya, dan aspek aspek dalam kehidupan bermasyarakat lainnya yang belum terorganisir dengan baik. Seperti halnya pada era globalisasi ini, individualisme (kepribadian) merupakan sebuah kewajiban. Kesempatan individu untuk mengatur dan menentukan yang baik bagi dirinya sendiri sangat terbuka lebar dan menghiraukan pekerjaan dan tanggung jawabnya (Responsibility) sebagai pemegang kendali di dalam birokrasi. Dengan membawa individualisme pemerintah dan masyarakat nantinya akan di rugikan. Menurut observasi, tidak dapat dipungkiri lagi, pemerintahan saat ini tidak efisien dan transparan kepada masyarakat dikarenakan adanya individualisme, yang menjerumuskan birokrat saat ini kedalam suatu permasalahan dan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah. Solusinya di dalam aspek budaya ada dua segi utama kehidupan, yaitu segi sosial dimana seorang birokrat harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan pemerintahan yang bersinergi dengan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan

perilaku yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkahlaku yang terlembagakan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik.

Ketiga permasalahan itu yang menjadi salah satu factor masalah perilaku didalam birokrasi termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi dan bentuk tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah sehari-hari. Setiap individu mempunyai karakteristik tersendiri, dan karakteristik tersebut akan dibawanya ketika ia memasuki lingkungan tertentu. Karakteristik ini berupa kemampuan, kepercayaan pribadi, kebutuhan, pengalaman dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan organisasi sebagai lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik tertentu, yaitu keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, pekerjaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem imbalan dan sistem pengendalian. Jika karakteristik individu dan karakteristik organisasi berinteraksi, maka terbentuklah perilaku individu dalam organisasi.

Perilaku birokrasi di Indonesia berkaitan dengan praktek birokrasi yang dibangun dari proses kesejarahan yang amat panjang, dari warisan kerajaan-kerajaan yang ada sampai pada lamanya masa kolonialisme. Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dari pengaruh sistem politik yang berlangsung. Apapun sistem politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yang menjadi masalah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Passi Timur yaitu tentang masalah prinsip dalam menyelenggarakan sistim pemerintahan. Aparat sering tidak Profesional dalam menjalankan tugas mereka, ketidak

seriusan dari para aparat ketika menjalankan tugas membuat pelayanan di kecamatan ini menjadi lamban, sangat dibutuhkan perilaku sehingga menciptakan hirarki birokrasi yang baik dari para aparat ketika menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bisa berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik.

Tinjauan Pustaka

Perilaku manusia merupakan kajian multi disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini karena perilaku itu sendiri merupakan refleksi dari berbagai macam segi, baik fisik maupun non fisik. Diantara cabang-cabang ilmu pengetahuan yang cukup besar sumbangsinya dalam pengembangan perilaku seperti yang dikemukakan Robbins (2009:44), yaitu:

1. Psikologi adalah ilmu yang berkenaan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku dari aspek kejiwaan.
2. Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari sistem sosial dimana individu memainkan perannya. Artinya sosiologi itu mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain (aspek masyarakat).
3. Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari perilaku antara peribadi (aspek sosial).
4. Antropologi yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk beluk manusia dan aktivitasnya (aspek budaya).
5. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam kelompok suatu lingkungan politik atau pemerintahan (aspek pengaturan)

Kelima disiplin ilmu itulah yang menjadi konsep dasar tentang perilaku termasuk berbagai faktor yang

mempengaruhi dan bentuk tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan tetap mengacu pada cabang-cabang ilmu tersebut yang mengkaji serta relevansinya dengan bahasa dalam penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu perilaku birokrasi, maka berikut akan diuraikan pengertian perilaku. Kata tingkah laku atau perbuatan mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu tidak hanya menyangkut kegiatan motoris saja seperti berbicara, berjalan, bergarak, dan lain-lain melainkan juga membahas macam-macam fungsi seperti melihat, mendengar, mengingat, berfikir. Semuanya itu merupakan bentuk aktivitas yang tergolong aktivitas spikis atau jiwani. Setiap penampilan dari kehidupan manusia bisa disebut aktivitas perilaku.

Birokrasi di maksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur) pekerjaan dari banyak orang. Dalam suatu rumusan lain dikemukakan bahwa birokrasi adalah "Tipe organisasi yang di pergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan tugas-tugasnya yang bersifat spesi-alisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparat pemerintah". Menurut Blau dan Meyer (2007:4), birokrasi dijadikan justru untuk melaksanakan prinsip instrumen prinsip organsasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, biarpun kadangkala dalam pelaksanaannya birokratisasi akibatnya seringkali malahan kurang adanya efisiensi. Malahan birokrasi ini terdapat

pada semua organisasi besar, tidak saja pada bidang militer atau pemerintah sipil, tetapi juga pada swasta dan lain-lain. Ambar Sulistiyani (2004:3), birokrasi adalah bentuk organisasi kekuasaan yang sepenuhnya diserahkan kepada para pejabat resmi atau aparat pemerintah yang memiliki syarat technical skill yaitu berkemampuan secara teknis melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya di dalam sistem administrasi pemerintahan. Menurut Ismail, 2009:176) Didalam birokrasi ada penyimpangan yang di sebut penyakit dalam birokrasi, pada mulanya, istilah patologi hanya dikenal dalam ilmu kedokteran sebagai ilmu tentang penyakit. Namun dengan berjalannya waktu analogi ini dikenal dalam birokrasi, dengan makna agar birokrasi pemerintahan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul, baik yang bersifat politis, ekonomi, sosio kultural dan teknologi, berbagai "penyakit" yang mungkin sudah dideritanya atau mengancam akan menyerangnya perlu diidentifikasi untuk kemudian dicarikan terapi pengobatan yang paling efektif. Harus diakui bahwa tidak ada birokrasi yang sama sekali bebas dari patologi birokrasi. Sebaliknya tidak ada birokrasi yang menderita "penyakit birokrasi sekaligus" siagian (2013:178) yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, social cultural dan teknologikal Patologi birokrasi atau penyakit birokrasi adalah "hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel-variabel lingkungan yang salah". Patologi birokrasi muncul dikarenakan hubungan antar variabel pada struktur birokrasi yang terlalu berlebihan, seperti rantai hierarki panjang, spesialisasi, formalisasi dan

kinerja birokrasi yang tidak linear Teruna dalam delly mustafa (2013:176). Birokrasi diharapkan dapat mewujudkan suatu tata pemerintahan yang mapu menumbuhkan kepercayaan publik, karena bagaimanapun pada akhirnya pelayanan publik produk dari suatu pemerintahan adalah terciptanya kepercayaan publik. Birokrasi tidak hanya sekedar melaksanakan kekuasaan, tetapi juga memiliki tujuan moral, sebuah birokrasi yang menghargai hak-hak masyarakat. Teruna dalam delly mustafa, (2007:180) Macam-macam patologi birokrasi Paternalistik Paternalistik yaitu: atasan bagaikan seorang raja yang wajib dipatuhi dan dihormati, diperlakukan spesial, tidak ada kontrol secara ketat, dan pegawai bawahan tidak memiliki tekad untuk mengkritik apa saja yang telah dilakukan atasan Pembengkakan anggaran Semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan semakin besar pula peluang untuk memark-up anggaran, tidak adanya kejelasan antara biaya dan pendapatan dalam birokrasi publik, terdapatnya tradisi memotong anggaran yang diajukan pada proses perencanaan anggaran sehingga memunculkan inisiatif pada orang yang mengajukan anggaran untuk melebih-lebihkan anggaran, dan kecenderungan birokrasi mengalokasikan anggaran atas dasar input Prosedur yang berlebihan akan mengakibatkan pelayanan menjadi berbelit-belit dan kurang menguntungkan bagi masyarakat ketika dalam keadaan mendesak Pembengkakan birokrasi, dapat dilakukan dengan menambah jumlah struktur pada birokrasi dengan alasan untuk meringankan beban kerja dan lain-lain yang sebenarnya struktur tersebut tidak terlalu diperlukan keberadaannya. Fragmentasi birokrasi, banyaknya kementerian baru yang

dibuat oleh pemerintah lebih sering tidak didasarkan pada suatu kebutuhan untuk merespon kepentingan masyarakat agar lebih terwadahi tetapi lebih kepada motif tertentu.

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa di nilai bila ia telah bersinggungan dengan prinsip-prinsip good governance, yaitu partisipasi masyarakat, rule of law, transparan, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, epektifitas, dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategis yang secara gamblang akan dijelaskan pada penerapan pada prinsip good governance, Delly Mustafa, (2013:186). United Nation Development Programme (UNDP); Pemerintahan yang mengem bangkan hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara , swasta dan masyarakat dalam mengelola, memadukan dengan baik pemerintahan (economic, politic,& administrative governance). Maka kunci utama memahami Good Governance adalah pemahaman atau prinsip-prinsip didalamnya, baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinanggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip Good Governance.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif penelitian deskriptif menurut Husaini Usman (2009:78) metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (Verstehen). Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingka laku manusia dalam situasi tertentu prespektif peneliti

sendiri. Yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Perilaku Birokrasi Dalam Mewujudkan Prinsip Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Passi timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan pengguna data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait fokus penelitian sehingga dapat menentukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian langsung kelokasi penelitian.

Penelitian menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan informan secara sengaja dan informan yang digunakan adalah mereka yang benar-benar paham dan dapat di percaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam mengenai permasalahan yang diteliti maka penelitian dalam hal ini menggunakan informan penelitian yang terdiri dari :

- Camat : 1 orang
- Sekertaris Camat : 1 orang
- Staff pegawai : 5 orang
- Masyarakat : 5 orang

Fokus penelitiannya adalah Perilaku birokrasi dalam mewujudkan prinsip pemerintahan yang baik di kecamatan Passi Timur Baru Kab.Bolaang Mongondow. Dengan melihat profesionalnya perilaku birokrasi aparat kecamatan passsi timur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dengan melihat aspek-aspek ;

- Akuntabilitas : para pengambil keputusan dan yang bertanggung jawab

- Equity ; perlakuan yang sama atas masyarakat yang tidak cukup/perlakuan yang adil
- Loyalty ; kesetian diberikan kepada konstitusi, hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja.
- Responsif ; setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab apapun yang dia kerjakan.
- Supremasi Hukum (Rule Of Law) Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu

Hasil Penelitian

Perilaku birokrasi aparat pemerintah yang ada di Kecamatan Passi Timur, seperti yang telah diuraikan dalam bagian latar belakang penelitian ini, bahwa aparat pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi pemerintahan daerah untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan, oleh sebab itu perilaku aparatur pemerintah sangat penting kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perilaku aparatur pemerintah dimaksudkan untuk membantu pegawai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja birokrasi pemerintahan kecamatan yang bersih serta profesional, oleh sebab itu bagian ini akan membahas mengenai perilaku pemerintahan aparatur dan pelaksanaan tugas dikantor kecamatan passsi timur, serta membahas upaya pemerintah meningkatkan perilaku birokrasi dikantor kecamatan passsi timur sehingga dapat terwujud birokrasi pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik banyak hal yang harus dipacu dan dikembangkan kepada aparat pemerintah, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat benar-benar harus mampu dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, memberikan

pelayanan secara maksimal kepada masyarakat gambaran pelaksanaan tugas aparat pemerintah di Kantor Kecamatan Passi Timur dapat dilihat dari perilaku aparat pemerintah yang merupakan gambaran apa saja yang menjadi tindakan aparatur. Seorang aparat pada pelaksanaan kerjanya, perilaku kerja ini dapat menggambarkan kinerja yang dimiliki oleh seorang aparatur pada bidang atau pada bagian yang ditempatinya. Perilaku kerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam segala bidang terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan diukur dan dinilai berdasarkan hasil kerja yang di capai oleh karena itu semuanya tergantung pada moral yang dimiliki oleh masing-masing aparatur baik atasan maupun bawahan apakah mereka mampu menjaga kemampuan kerja dengan baik atau tidak.

Untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang bagaimana perilaku birokrasi aparatur di Kecamatan Passi Timur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, peneliti melakukan pengamatan seksama kurang lebih dua minggu terhadap aktivitas yang terjadi di Kantor Kecamatan Passi Timur tersebut. Dalam hal ini peneliti menitikberatkan pada perilaku aparat dalam memberikan pelayanan, bagaimana kedisiplinan aparat dalam bekerja dan bagaimana efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas aparatur. Hasil penelitian, sehubungan dengan sikap dan perilaku birokrasi aparatur di Kecamatan Passi Timur yang ditinjau dari aspek etika pemerintahan dengan menggunakan beberapa kajian sebagai tolak ukurnya, yaitu: Akuntabilitas : para pengambil keputusan dan penanggung jawab untuk pelayanan yang diberikan, Equity: perlakuan yang adil atas pelayanan yang diberikan, Loyalty: kesetiaan pada

aturan, hukum dan atasan serta rekan kerja, Responsif: tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, kualitas moral pribadi: mencakup sikap kejujuran, keberanian dan optimisme dalam bekerja, Supremasi Hukum (Rule Of Law) Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu.

Dapat diuraikan sesuai dengan hasil berikut ini:

1. Akuntabilitas

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang aparat pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima dan maksimal kepada semua pihak tanpa memandang status sosial, afiliasi politik atau bahkan hubungan kekerabatan. Perlakuan yang sama atas pelayanan yang diberikan selalu dituntut kepada aparat pemerintah untuk menghindari terjadinya kecemburuan sosial yang bisa mengakibatkan terjadinya konflik pada masyarakat, selain itu untuk efektifitas dan efisiensi pekerjaan aparat itu sendiri. Pada intinya semua masyarakat dari kalangan manapun berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari aparat pemerintah.

2. Equity

Equity atau perlakuan yang adil dalam pelaksanaan tugas aparatur pemerintah sangatlah penting, karena hal ini akan menimbulkan efek negatif dalam suatu lembaga pemerintahan itu sendiri. Untuk masyarakat yang pluralistic seperti Indonesia kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama dalam memberikan pelayanan dan kadang-kadang pula dibutuhkan perlakuan yang adil tapi tidak sama kepada orang-orang tertentu. Salah satu contoh konkretnya dalam pengurusan berkas kenaikan pangkat, pegawai berhak atas perlakuan yang adil, dengan persyaratan, mungkin biaya-biaya

administrasi yang telah di tetapkan. Demikian juga dengan urusan-urusan lain yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama dan perlakuan yang adil dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. Loyalty

Setiap aparatur pemerintah dituntut loyalitasnya terhadap aturan yang berlaku, terhadap atasan maupun terhadap rekan kerja. Berbagai jenis loyalitas atau kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis loyalitas atau kesetiaan tertentu dengan mengabaikan yang lainnya. Sebagai contoh loyalitas terhadap aturan yang berlaku, harus loyal kepada hukum dan konstitusi yaitu bersikap setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila dan UUD 1945. Selain itu dari hasil penelitian mengenai tingkat loyalitas aparatur terhadap aturan kedinasan yang berlaku, terutama kedisiplinan terhadap jam kerja. Dari hasil penelitian ternyata aparatur yang loyal terhadap peraturan kedinasan berbanding. Loyalitas terhadap peraturan kedinasan lebih banyak berkaitan langsung dengan kedisiplinan kerja seorang aparatur, baik itu menyangkut kedisiplinan masuk kantor, keluar kantor, berpakaian dinas dan lain sebagainya, oleh sebab itu meskipun terdapat lebih banyak aparatur yang disiplin dibanding dengan yang tidak disiplin, hal ini menyangkut loyalitas aparatur pemerintah terhadap peraturan-peraturan kedinasan harus disikapi lebih lanjut dan harus lebih mendapat perhatian terutama oleh camat sebagai pimpinan di Kantor Kecamatan Passi Timur, karena ternyata masih cukup banyak aparatur yang kurang taat terhadap peraturan-peraturan kedinasan yang ada.

Selain kedua hal yang telah disebutkan diatas, tingkat loyalitas terhadap atasan perlu mendapat

perhatian. Atasan sebagai pimpinan haruslah ditunjang oleh loyalitas dari bawahannya sehingga penyelenggara tugas dapat berjalan dengan baik, karena adanya kerja sama yang baik pula antara atasan dan bawahan. Loyalitas terhadap atasan yang dimaksud disini bukan rasa takut yang berlebihan, sehingga apapun yang diperintahkan atasan meskipun sudah diluar jalur yang harus dilaksanakan. Loyalitas terhadap atasan disini adalah kesetiaan terhadap atasan didalam koridor dan ruang lingkup pekerjaan. Dimana dalam hal ini seorang atasan harus dihormati, hargai dan ditaati apabila menyangkut keberhasilan pekerjaan.

4. Responsif (Responsivene)

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga-lembaga harus siap melayani semua pihak yang berkepentingan, seorang aparatur harus menghindari diri dari anggapan: “saya sekedar melaksanakan perintah atasan sebagai wujud rasa tanggung jawabnya atas pekerjaan”. Jadi dalam hal ini ada rasa kepedulian yang tinggi dari aparatur terhadap keberhasilan dari suatu pekerjaan. Karena apabila dalam menjalankan suatu tugas atau pekerjaan seorang aparatur hanya berprinsip sekedar hanya menjalankan suatu perintah atasan, maka bukan tidak mungkin pekerjaan itu tidak akan sempurna hasilnya. Optimisme adalah kualitas moral yang pertama yang harus dimiliki aparatur pemerintah. Sikap dan perilaku optimis ini adalah berupa kemampuan aparat pemerintah. Sikap dan perilaku optimis adalah berupa kemampuan aparatur untuk menangani dan menjalankan tugas secara baik. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang aparatur pemerintah dituntut harus bersikap optimis bahwa tugasnya akan berjalan dengan lancar dan

berhasil. Optimis dapat juga diartikan semangat dalam menjalankan tugas. Seorang aparatur yang menjalankan tugasnya dengan penuh semangat akan berpengaruh pada hasil kerja dan kualitas kerja aparatur itu sendiri. Akan tetapi semangat yang dimaksudkan disini adalah bukan semangat yang asal-asalan dengan kata lain yang penting semangat hasilnya belakangan, tapi semangat yang dimaksudkan disini adalah semangat yang disertai tanggung jawab untuk menuju pada kesuksesan dan keberhasilan tugas atau pekerjaan.

Kesimpulan

1. Perilaku aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari, pada Kantor Kecamatan Passi Timur, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa etika/moral aparatur masih tergolong rendah, dengan adanya praktek-praktek yang tidak terpuji dalam memberikan layanan kepada mereka yang membutuhkan pelayanan, sehingga belum dapat mewujudkan birokrasi pemerintah kecamatan passsi timur yang profesional.
2. Akuntabilitas : pengambil keputusan dan perlakuan yang sama hasil penelitian bahwa para pegawai di kecamatan passsi timur telah melakukan prinsip ini. Equity : Keadilan dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil penelitian telah menemukan rasa keadilan, kekeluargaan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Loyalitas : Tindakan seseorang yang patuh dan taat pada atasan dan instansi dalam hal aparat pemerintah dalam hal ini diterapkan di Kecamatan passsi timur. Responsibility : Rasa tanggung jawab yang dimiliki seorang sesuai dengan tupoksi dan itu ditunjukkan di Kecamatan Passi Timur. Supremasi

Hukum : kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, sebagian besar aparatur pemerintah di Kecamatan Passi Timur telah memahami, menghayati bahkan mengamalkan prinsip-prinsip etika pemerintahan, meskipun masih ada beberapa yang masih kurang memahami dan tidak menerapkan etika pemerintahan tersebut.

Saran

1. Sebaiknya dilakukan revitalisasi moral pada aparatur pemerintah di kantor Kecamatan Passi Timur. Dengan moral dan perilaku yang etis yang harus dimulai dari perilaku aparatur secara individu, antara lain dengan melakukan pendidikan pengembangan karakter untuk meningkatkan kualitas moral etika aparat.
2. Seharusnya perlu ada kesejahteraan pegawai dalam rangka peningkatan tanggung jawab dan kinerja aparatur sehingga indikator equality, equity, loyalty, responsibility, maupun sikap moral aparatur berubah menjadi signifikan.
3. Diharapkan aparatur pemerintah harus memiliki etika yang baik di Kecamatan Passi Timur agar didalam pengembangannya tidak semata-mata mengindoktrinasikan apa yang boleh atau tidak boleh dikerjakan seseorang apartur pemerintah, tetapi lebih dari pada itu ialah upaya yang terus menerus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme yang bermanfaat efektifitas penyelenggaraan tuga -tugas aparatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Blau. P. M dan Meyer. M. W. 2007. Birokrasi dalam Masyarakat Modern. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
- Bryan W 2009. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Cetakan Pertama, Ahli Bahasa Rusyanto L. Simatupang, LP3ES. Jakarta
- Davis. Keith dan John W. Newstrom. 2008. Perilaku Dalam Organisasi. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Delly M. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Jakarta: Penerbit ALFABETA.cv
- Gibson. 2009. Organisasi: Perilaku. Struktur dan Proses. Jakarta : Binarupa Aksara. (Jilid I dan II)
- HM. Ismail 2009 Birokrasi dan organisasi publik. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Husaini. Usman. 2009. Manajemen Teory. Praktik. dan Riset Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Krisyanto. Eddy. 2013. Etika Pemerintahan Indonesia. Jakarta : Radar jaya Offset.
- Lexy J. Moleong 2010 Metodologi Penelitian kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sondang P. Siagian 2013 Birokrasi pemerintahan dan kekuasaan. Jakarta. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Robbins. Stephen P. 2009. Perilaku Organisasi. (Jilid 1 dan 2). Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia..
- Thoha. M. 2005. Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jilid II). Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Thoha. M. 2012. Birokrasi Pemerintahan Indonesia, Editor : Suraji. Thafa Media